

**PELAKSANAAN PENGANTIAN TANAH WAKAF MENURUT
HUKUM ADAT ACEH DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI KABUPATEN ACEH BESAR)**

RIFQI FATRIZAL

ABSTRACT

The result of the research showed that the implementation of the wakaf land compensation at Tanjung Village done by individuals was not in accordance with Law No. 41/2004 on Wakaf because it was not registered and there was no approval from the Agrarian Minister and the Indonesian Wakaf Board. Besides that, the process of transfer was not in accordance with Article 40 F of Law No. 41/2004 on Wakaf because it was not for public interest. According to the Islamic law, land transfer which is not in accordance with its area and price of its original ones was not legally justified by the Islamic law. In consequence, it had no legal certainty; therefore the solution should be based on negotiation stipulated in Article 62, paragraph 1 of Law No. 41/2004 on Wakaf and on the Acehese customary law, and it should be held at the level of Gampong (village).

Keywords: *Implementation of Wakaf according to the Acehese Customary Law, Law No. 41/2004 on Wakaf, the Islamic Law*

I. Pendahuluan

Wakaf (*waqf*) di dalam bahasa arab berarti *habs* (menahan). Menurut syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹ Pengertian Wakaf asal katanya “*waqfa*” yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri, pengertian menahan atau berhenti atau diam ditempat dalam pengertian wakaf ini adalah dihubungkan dengan harta kekayaan.²

Sebagian *fuqahā* lainnya mengaitkan dasar hukum wakaf dengan ayat-ayat Al- Qur`an yang memerintah orang-orang yang beriman untuk berbuat baik, yang terdapat dalam ayat-ayat berikut ini Al-Qur`an surat Āli ‘Imrān ayat 92 menentukan: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang

¹ Mudzakir AS, *Fikih Sunnah/As – Sayyid Saabiq, Jilid 14*, Alma’arif, (Bandung, Cet 4 1994, hal. 148)

² M. Hasballah Thaib, *Fiqih Wakaf*, Konsentrasi Hukum Islam program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, (Medan, 2003, hal. 1).

kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. Ayat Al-Qur’an tersebut menurut para ahli dapat digunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.³

Pada masa kerajaan Aceh mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan yaitu *Qanun Qeukuta* atau Qanun *al-Asyi* diantaranya mengenai Balai Meusura. Balai ini bertugas mengelola hal-hal tentang Wakaf. Hal ini terbukti dengan di terima lembaga Wakaf ini dalam hukum adat di Indonesia yang ternyata hanya baru merupakan pengawasan dan pencatatan benda wakaf.⁴

Pengakuan hukum adat yang lebih tegas terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aceh, Khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (untuk selanjutnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh), namun Undang-Undang Pemerintahan Aceh mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dalam konteks Kelembagaan dan Kewenangan adat istiadat serta fungsi pemerintahan.

Perubahan status benda wakaf diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yakni sebagai berikut :

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. Dhibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Terdapat pengecualian pasal 40 huruf f yang diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Umumnya masyarakat yang melaksanakan perwakafan, langsung berhadapan dengan Nazhir bahwa Wakif akan mewakafkan hartanya dan Nazhir akan melapor Ke Kantor Urusan Agama (untuk selanjutnya disebut KUA), dari

³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1988, hal. 80)

⁴Sejarah Adat Perwakafan <https://aljurem.wordpress.com/tag/hukum-adat/>. Di akses pada tanggal 16 September 2015

KUA Kecamatan akan di laporkan kepada Departemen Agama Kabupaten/ Kota. Realita yang terjadi di dalam masyarakat Aceh, wakaf hanya dilaksanakan dengan melafadzkan kata-kata mewakafkan objek tanah yang diikrarkan secara lisan kepada Imam Meunasah (Mushala) Gampong (desa) dan disaksikan oleh saksi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karena dalam melaksanakan ikrar wakaf oleh wakif tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (untuk selanjutnya disebut PPAIW).

Menurut Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).⁵

Kasus yang akan diteliti dalam tesis ini bermula, bahwa pemilik tanah pada tahun 2004 telah meninggal dunia akibat Gempa dan Tsunami yang melanda Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh besar Kecamatan Lhoknga, Gampong (Desa) Tanjung, maka oleh kesepakatan ahli waris tanah hak milik tersebut di Wakafkan melalui Imam Meunasah (Mushala) atau kepada nazhir perseorangan untuk kepentingan Meunasah (Mushala). Adapun tanah yang diwakafkan secara Adat Gampong tersebut tidak mempunyai alas hak atau sertifikat, karena tanah tersebut sudah diwakafkan kepada Meunasah (Mushala), maka tanah tersebut dalam pengawasan pihak Gampong yaitu Perangkat Gampong, yang semula tanah tersebut bertujuan untuk kepentingan Meunasah (Mushala), lalu pihak Perangkat Gampong, melakukan penggantian atau penukaran dengan cara memperjualbelikan tanah tersebut kepada salah satu masyarakat setempat secara dibawah tangan berdasarkan sporadik yang dikeluarkan oleh Geuchik pada masa itu.

Bahwa semulanya tanah penggantian tersebut seharusnya akan digantikan dengan tanah yang berada di samping meunasah Desa Tanjung, dengan tidak adanya sepengetahuan oleh masyarakat, tanah tersebut di alihkan ketempat lain, maka tanah yang digantikan tersebut tidak sesuai dengan tanah semula, baik itu dari segi ukuran tanah dan harganya lebih murah, akibat tanah yang berada di

⁵ Adijani Al-alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta Rajawali , 1989, hal. 34-35)

dekat Mushala juga belum terealisasi pembeliannya, maka masyarakat tidak sepakat dengan hal tersebut, masyarakat meminta kejelasan kepada perangkat desa yang mengalihkan tanah tersebut.

Berdasarkan informasi dari mantan Geuchik (kepala Desa) Gampong (Desa) Tanjung tanah wakaf tersebut diikrarkan secara lisan sesuai adat Gampong (desa) kepada Imam Meunasah (Mushala) Gampong (Desa) Tanjung Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, terhadap tanah tersebut tidak adanya suatu kepastian hukum. Akibatnya tanah tersebut dapat dialihkan dan itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.⁶

Tanah tersebut digantikan dengan dilakukan penjualan dengan penggantian tanah yang lain. Dengan tidak dilaksanakan ikrar wakaf kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mengakibatkan sulit untuk membuktikan bahwa harta benda yang telah diwakafkan itu benar-benar sudah menjadi wakaf dan hal lain juga mengakibatkan kesulitan bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk menuangkannya dalam akta ikrar wakaf. Sehingga penggantian tanah wakaf dalam kasus di atas bertentangan dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan hukum Islam karena tidak sejalan dengan apa yang seharusnya.

Perumusan masalah peneltian ini adalah :

1. Bagaimana Kedudukan penggantian tanah wakaf berdasarkan hukum adat Aceh dipandang dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan hukum Islam?
2. Bagaimana Pelaksanaan penggantian tanah wakaf secara hukum adat Aceh dipandang dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan hukum Islam?
3. Bagaimana akibat hukum penggantian benda wakaf secara hukum Adat Aceh dipandang dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan hukum Islam?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

⁶ Teuku Marwan Amry, Mantan Geucik Gampong Tanjong Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Wawancara, 03 November 2015.

1. Untuk mengetahui Kedudukan penggantian tanah wakaf berdasarkan hukum adat Aceh dipandang dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan penggantian tanah wakaf secara hukum adat Aceh dipandang dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui akibat hukum penggantian benda wakaf secara hukum Adat Aceh dipandang dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan hukum Islam.

II. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sedangkan Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis.⁷

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah ketetapan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, *Ijma'* Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

b. Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah wakaf.

c. Bahan hukum tertier.

⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, (Bandung, Alumni, 1994, hal. 101)

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, ensiklopedia, yang berhubungan atau berkaitan dengan materi penelitian.⁸

Untuk mendapat data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk menguraikan sistematika tentang teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian.⁹

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data primer yang di peroleh langsung dari informan dan responden dengan cara menggunakan kuisioner terbuka. Dan untuk melengkapi data-data yang butuh juga dilakukan wawancara.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Sejarah mencatat, bahwa Masyarakat Aceh pernah berperan sebagai bangsa di dunia, dibawah kepemimpinan sultan-sultan yang turun-temurun sejak Sultan Ali Mughayat Syah tahun (1514-1528) sampai berakhirnya dengan tertangkapnya Sultan Muhammad Daud Syah, sebagai Sultan Aceh yang terakhir (1874-1903). Dimasa pemerintahan Sultan tersebut Aceh telah membangun diri sendiri berdasarkan pada suatu tatanan adat budaya.¹⁰

Al-Adatu Muhakkamah artinya adat kebiasaan dapat menjadi hukum. Jalaluddin al-Sayuthi menjelaskan bahwa dasar hukum dari akidah ini adalah Hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah bin Mas'ud, "apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik disisi Allah." Status hadist ini *mauquf* (hadist yang disandarkan kepada sahabat),

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penemuan Hukum, Ghalia Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 52)

⁹ Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis*, (Yogyakarta, Cv. Andi Offset, 2005, hal. 21)

¹⁰ Badruzaman dan Sanusi M. Syarif, *Sejarah Majelis Adat Aceh*, (Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, hal 23).

menurut Ismuha, kecuali hadits *mauquf* ini masih ada nash lain yang lebih kuat yang dapat dijadikan dasar hukum dari aqidah ini, yaitu ayat-ayat Alquran.¹¹

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh telah mengesahkan dua qanun yang mengatur permasalahan Adat Aceh. Qanun-qanun yang dimaksud adalah :

1. Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang poembinaan Adat dan Istiadat
2. Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang sifatnya tidak kaku, akan tetapi terus berkembang dan dapat mengikuti masyarakat pendukungnya. Dari aspek budaya selaku prilaku yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan disebut dengan “adat”.

Adat dan kebiasaan dapat dibedakan dalam hal aturan dan perbuatan yang lazim atau dilakukan sejak dahulu kala yang mengatur kehidupan manusia. Aturan yang mengatur kehidupan manusia di Aceh bisa menjadi sebuah aturan hukum yang mengikat disebut hukum adat. Sedangkan kebiasaan dapat diartikan serupa dengan pegertian adat, yang membedakanya dari segi kebiasaan yang dipergunakan untuk perseorangan, sedangkan adat dipergunakan oleh sekelompok orang.¹²

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹³

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip harta benda wakaf termuat dalam Pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

¹¹ Rusjdi Ali Muhammad, *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004, hal.457-458)

¹² Badruzzaman Islamil, *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Ada*, (Banda Aceh, Cv.Bobon Jaya, 2013, hal 8-9)

¹³ Pengelolaan Harta Wakaf Dan Syarat <http://syirooz.blogspot.co.id/2012/11/> t. Diakses pada tanggal 02 Februari 2016

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan untuk harta wakaf yang digantikan, apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syari'ah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Fungsi wakaf dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengelolaan yang profesional. Sehingga wakaf yang diberikan oleh wakif dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi umat. Namun dalam penerapannya, pengelolaan wakaf di Indonesia masih kurang optimal, sehingga masih banyak harta atau benda wakaf yang kurang produktif bahkan banyak yang tidak terawat. Hal ini menjadi problem besar bagi Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sehingga seharusnya wakaf memiliki peranan yang besar dalam peningkatan kesejahteraan umat malah belum memberikan kontribusi yang maksimal.¹⁴

Syarat dan unsur-unsur wakaf

1. Wakif
2. Nazhir
3. Harta Benda Wakaf
4. Ikrar Wakaf
5. Peruntukan Harta Benda Wakaf
6. Jangka Waktu Wakaf.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum.¹⁵

Pandangan mengenai pengertian wakaf di atas, maka secara menyeluruh dapat kita ambil kesimpulan yaitu:

¹⁴Pengelolaan Wakaf di Indonesia <http://artikel.ilmiah.lengkap.blogspot.co.id/2015/03/makalah-pengelolaan-wakaf-di-indonesia.html> , pada tanggal 03 Januari 2016.

¹⁵Abdul Manan, *Op.Cit*, Hal 238

- a. Menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi
- b. Definisi wakaf ini mencakup harta, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.
- c. Mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau mengambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang.
- d. Berulang-ulang manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar maupun selamanya.
- e. Menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan mencakup juga wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya.
- f. Mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial dan sebagainya, juga mencakup kebaikan khusus yang dimanfaatkan untuk kebaikan keluarga wakif.
- g. Mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan perundang-undangan bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan wakif dan mencakup pentingnya penjagaan wakif.¹⁶

Apabila *wakif* melarang, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Maka dari itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".¹⁷

Para ulama sepakat wakaf merupakan salah satu amal kebajikan dalam ajaran Islam. Wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah SWT. Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar dari pada ibadah wakaf menurut ajaran Islam, walaupun didalam Al-Qur'an secara tidak tegas dan terperinci mengatur persoalan wakaf .

Hadist yang didasarkan menjadi hukum wakaf adalah :

Hadist yang diriwayatkan dari Abi Hurairah yang terjemahannya :

Bahwa Rasulullah SAW bersabda "Apabila meninggal manusia maka terputuslah pahala dan segala amalnya kecuali tiga Macam yaitu, sedekah

¹⁶ Munzir Qohar, *Op.Cit*, Hal 53-54

¹⁷ *Ibid*, hal. 153

jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang selalu mendoakannya”¹⁸

Menurut aturan Hukum Islam yang mana Wakaf sebagai tindakan berdasarkan nilai tersendiri yang menyebabkan tertahannya harta yang diwakafkan dan manfaatnya diberikan kepada pihak yang ditentukan oleh waqif. Namun yang menjadi persoalan yaitu ketika wakif tidak mensyaratkan penggantian tanah wakaf, maka dalam kasus ini permasalahannya penggantian tanah wakaf yang dilaksanakan oleh hukum adat Aceh telah terjadi kesalahan atau tidak sesuai Syariah, bahwa tanah wakaf yang digantikan tersebut ukuran tanah dan harga tanah wakaf tidak sesuai dengan tanah yang digantikan pada mulanya. Menurut H. M. Hasballah Thaib dalam bukunya 21 masalah Aktual dalam pandangan Fiqih Islam, apabila wakaf itu dijual atau ditukar maka harga atau penggantian tersebut harus sesuai dengan jenis wakaf yang dijual dengan aslinya dan yang melakukan penggantian tersebut hak Imam.¹⁹

Pengelolaan agar pengembangan tanah wakaf terjaga maka yang harus dilakukan oleh nazhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang termuat dalam Pasal 44.

Harta benda yang sudah diubah statusnya, wajib ditukar dengan harta benda yang manfaatnya dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Setiap perubahan atau ditukar harta benda wakaf peruntukannya maka nazhir wajib mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰

Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya adalah pengelola wakaf (Nazhir). Faktor lemahnya profesionalisme Nazhir menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf setelah diukur oleh standar minimal yang harus dimiliki oleh seorang Nazhir, yaitu: beragama Islam, mukallaf, baligh, kompeten dalam mengelola wakaf dan amanah serata jujur dan adil. Jujur merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seluruh manusia

¹⁸ Hasballah Thaib, *Fiqih Wakaf*, Medan, Kosentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003, hal.3-4.

¹⁹ Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqih Islam*, (Medan, Fakultas Tarbiyah Universitas Dharmawangsa, 1995, hal 196)

²⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, Grasindo, 2006, hal. 61)

terutama bagi pengelola wakaf sebab orang yang memiliki sifat jujur mendapat kepercayaan dari orang lain. atau masyarakat karena orang yang jujur senantiasa berusaha untuk menjaga amanah.²¹

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Para ulama juga sepakat bahwa Nazhir dipercaya atas harta wakaf yang dipegangnya. Sebagai orang yang mendapat kepercayaan nazhir tidak bertanggung jawab untuk mengganti harta wakaf yang hilang, jika hilangnya barang tersebut bukan karena faktor kesengajaan atau kelalaian.

Pelaksanaan wakaf berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoknga sudah direalisasikan dengan baik, bahkan pada kecamatan Lhoknga hampir semua tanah wakaf sudah di daftarkan kecuali tanah yang diwakafkan secara adat atau di bawah tangan saja yang tidak terdata, salah satunya yang berada di kampung tanjung Kecamatan Lhoknga. Bahwa tanah yang tidak terdaftar di KUA apabila terjadi masalah, menurut KUA Kecamatan Lhoknga bukan merupakan wewenang KUA untuk menyelesaikannya, karena tugas dan wewenang KUA adalah, apabila ada tanah wakaf yang bermasalah dan bersertifikat wakaf yang di buat berdasarkan Akta Ikrar Wakaf, maka pihak KUA berhak untuk menyelesaikan masalah tersebut.²²

Terhadap tatacara perwakafan yang dilaksakan oleh KUA Kecamatan Lhoknga salah satunya memastikan bahwa tanah yang di Ikrarkan tidak dalam sengketa dan meminta persetujuan dan persetujuan pada wakif terlebih dahulu apabila nanti terjadi sengketa tidak menjadi hal yang rumit dalam menyelesaikannya, dan dalam perwakafan tersebut harus memenuhi para pihaknya yaitu Nazhir, Saksi dan wakif.²³

²¹ Murtadha, S.Ag., *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga*, wawancara pada tanggal 03 Maret 2016.

²² Murtadha, S.Ag., *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga*, wawancara pada tanggal 03 Maret 2016.

²³ Ibid

Bahwa pelaksanaan penggantian tanah wakaf yang terjadi di Gampong (Desa) Lhoknga yang dilaksanakan oleh Nazhir dan perangkat Desa tidak dibenarkan, karena penggantian tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan aturan Syari'at karena maksud dan tujuan pertukaran tidak jelas, karena pertukaran tanah wakaf tersebut haruslah sesuai dengan tanah sebelumnya begitu pula dengan harganya, dan pertukaran tersebut harus untuk kepentingan umat, tidak dibenarkan untuk hal yang lain, walaupun untuk gampong itu sendiri, karena Gampong telah dialokasikan dana khusus.

Pelaksanaan Penggantian tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Lhoknga belum pernah terjadi, akan tetapi penggantian tanah wakaf secara adat yang dilakukan oleh masyarakat dan terjadi sengketa Penggantian atau pertukaran dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lhoknga, tetapi hal demikian tidak bisa ditindak lanjuti, karena wewenang dari pada KUA Kecamatan Lhoknga terhadap sengketa tanah wakaf akan bisa ditindaklanjuti apabila tanah wakaf tersbut didaftarkan di KUA Kecamatan Lhoknga, ataupun terkait permasalahan dengan keautentikan suatu benda wakaf.²⁴.

Perubahan terhadap harta benda yang diwakafkan menurut hukum Islam dengan jalan *isthisan*, yaitu suatu cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan demi kepentingan sosial yang menghendaki.²⁵ Persoalan penggantian benda wakaf telah berlaku sejak lama dan dari penggantian ini muncul sisi negatif dan positif. Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa apabila salah satu rukun atau syarat wakaf tidak terpenuhi, maka wakafnya batal.

Penggantian karena kepentingan dan *masalahat* (kemanfaatan orang banyak) yang lebih kuat. Misalnya ada mesjid yang sudah tidak layak guna baginkaum muslimin stempat, maka boleh dijual dan uangnya digunakan untuk membangun mesjid yang baru sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.²⁶

²⁴ *Ibid*, Wawancara dengan Ketua KUA tanggal 03 Maret 2016

²⁵ Elsi Kartika sari, Op. Cit, hal. 76.

²⁶ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hal. 81-82.

Pelaksanaan wakaf sah dan terjadi melalui melalui salah satu dari dua perkara :

- a. Perbuatan yang menunjukkan padanya seperti bila seseorang membangun mesjid dan dikumandangkan adzan untuk shalat di dalamnya, dan ia tidak memerlukan keputusan dari seorang hakim.
- b. Ucapan ini ada dua yang sharih (tegas) dan yang kinayah (tersembunyi)

Yang sharih misalnya, ucapan orang yang mewakafkan, “aku wakafkan,” “aku hentikan pemanfaatannya,” “akujadikan untuk sabilillah,” “aku abadikan.” Yang kinayah, seperti ucapan orang yang mewakafkan, “aku sedekahkan,” akan tetapi dia berniat mewakafkannya. Adapun wakaf yang dihubungkan dengan kematian, seperti kata seseorang, rumahku atau kudaku menjadi wakaf sesudah aku mati. Maka hal itu diperbolehkan menurut zhahirnya madzhab Ahmad, seperti disebutkan oleh Al-Khiraqi dan lain-lain, sebab ini semua termasuk kedalam wasiat, maka oleh karena itulah ta’liq kematian untuk wakaf diperbolehkan²⁷. Para Ulama membenarkan menggantikan tanah harta wakaf, namun di isyaratkan harus ada izin dipemerintah yang dalam istilah dulu disebut dengan Imam / Qadhi.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pasal 50 menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia mengenai penggantian benda wakaf.²⁹ Adapun dalam pandangan fiqih Islam untuk melaksanakan penukaran atau penjualan harta wakaf adalah hak Imam. Dalam hal ini adalah petunjuk Kepala Kantor Urusan Agama setempat dan Majelis Ulama dimana tanah wakaf tersebut berada.³⁰

Keuchik (Kepala Desa) Desa Tanjung membenarkan bahwa terhadap tanah wakaf yang berada di Gampong Tanjung Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh besar telah terjadi penyelewengan, terhadap harta wakaf tersebut dijual dan digantikan dengan tanah yang lain, terhadap tanah yang digantikan menurut Geuchik Gampong Tanjung ada hal yang tidak sesuai yaitu tanah yang digantikan

²⁷ Mudzakir, *Fikih sunnah*, (Jakarta, Percetakan Offset, 2005, hal. 155-156).

²⁸ Tgk. Muhammad MJ, Wawancara dengan Ketua MPU Aceh Besar pada tanggal 08 Maret 2016

²⁹ *Loc, Cit*, Hasbllah Thaib, hal.196.

³⁰ *Ibid*, 197.

tidak sesuai dengan tanah asal dan harganya pembelian tanah yang digantikan tersebut lebih murah, dan kelebihan uang penjualan tidak jelas dibawa kemana.³¹

Maka sesuai dengan pandangan fiqih Islam sudah menyalahi aturan dan tidak dibenarkan karena terjadi penyelewengan terhadap tanah wakaf yang seharusnya tidak bisa ditukar jika tidak ada kepentingan bagi umat Islam atau masyarakat setempat.

. Maka terhadap tanah wakaf yang di wakafkan secara lisan ataupun berdasarkan tatacara adat setempat yang terjadi dalam masyarakat aceh dikuasai oleh para kelompok tersebut dan pusaka keluarga Uleebalang, dan pada masa tersebut tanah wakaf banyak yang dialihkan dengan cara pembagian oleh DI/TII untuk keperluan perjuangan atau sumber pendapatan dan selebihnya diserahkan kepada keluarga Uleebalang.³²

Faktor lainnya adalah ketidakjujuran masyarakat sekarang terhadap tanah wakaf yang dititipkan oleh orang terdahulu. Maka disinilah yang mengakibatkan masyarakat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah yang di tinggalkan oleh orang tua mereka tetapi status tanah tersebut dalam keadaan telah diwakafkan. Maka terhadap kejujuran atau Amanah yang diberikan oleh para pewakif tidak di jalankan dengan baik, sehingga terjadi penjualan ataupun memiliki tanah tersebut secara turun-temurun secara pribadi, tetapi tidak untuk kepentingan umat.

Terhadap faktor penggantian tanah wakaf yang terjadi di desa Tanjung akibat ketidakpahaman ataupun penafsiran pihak yang melakukan penggantian bahwa tanah yang diwakafkan oleh pewakif kepada nazhir tersebut diartikan sebagai tanah gampong, yang seharusnya tanah tersebut mutlak diwakafkan untuk Meunasah (mushala), dengan alasan demikian pihak yang penggantian tanah wakaf tersebut dengan mudah mengalihkannya.³³

Menurut ketua MAA, sebelum merdeka tanah wakaf yang berada di Aceh sangatlah banyak, pada masa itu Uleebalang sebagai pemilik tanah mewakafkan tanahnya untuk kepentingan ummat atau masyarakat Aceh.³⁴

³¹ T.Marwan, Keuchik Desa Tanjung, Wawancara tanggal 14 Maret 2015.

³² Badruzzaman Ismail, ketua MAA Provinsi Aceh. Wawancara tanggal 10 Maret 2016

³³ Teuku Marwan, Keuchik Desa Tanjung, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2016

³⁴ *Ibid*, Wawancara dengan Ketua MAA.

Menurut Imeum Menasah pada masa 2006 tanah wakaf tersebut di ikrarkan kepada beliau sebagai tanah wakaf Gampong yang bertujuan untuk kepentingan Meunasah gampong tanjung, orang yang mewakafkan tanah tersebut adalah Cut kemala dan Anwar sebagai ahliwaris dari Almarhum Zamzami pemilik tanah asal sebelum diwakafkan oleh ahli waris. Bahwa tanah tersebut diwakafkan dengan cara memberi ikrar saja seperti kebiasaan masyarakat dan disaksikan oleh Anwar dan satu orang perangkat desa.³⁵

Menurut keterangan Ketua Tuha Peut yaitu Yusuf, yaitu sebuah institusi budaya Gampong yang berfungsi memberi nasihat/saran kepada keuchik dalam berbagai bidang masyarakat³⁶. Bahwa benar adanya penggantian tanah wakaf yang diwakafkan pada gampong tanjung yang dikirarkan kepada imeum meunasah (mushala) yaitu untuk meunasah, tetapi pada masa sebelum saya menjabat sebagai Ketua Tuha Peut, yang melakukan pengantian tanah wakaf tersebut oleh perangkat desa dan Imuem menasah pada priode sebelumnya yaitu pada tahun 2006.³⁷ Bahwa menurut masyarakat yaitu bapak Mahlim, yang pada masa priode 2006 menjabat sebagai Ketua Urusan pembangunan Gampong tanjung, juga menjelaskan bahwa tanah tersebut benar dialihkan oleh prangkat Desa pada masa itu, dengan alasan untuk kepentingan Gampong.

Menurut Keuchik Gampong Tanjung pelaksanaan penggantian tanah yang digantikan akan disatukan dengan tanah yang berada di samping Meunasah Tanjung untuk perluasan Meunasah, tetapi pada masa itu tidak terjadi perpindahan ke samping meunasah, tetapi oleh pihak perangkat desa dipindahkan ke dalam gampong tanjung yang terletak 5 (Lima) kilometer (km) dari Meunasah, maka terjadilah penggantian, tetapi menurut Keuchik Teuku Marwan hal tersebut tidak relefan karena, kondisi tanah yang digantikan sangatlah tidak sama luas dan harganya, karena tanah yang dibeli termasuk tanah rawa-rawa, dan menurut beliau uang hasil pembelian tanah penggantian tersebut di manfaatkan secara pribadi dengan alasan keperluan gampong pada saat itu, disinilah terjadi konflik antara Perangkat Desa dengan masyarakat, sehingga permasalahan ini di tangani oleh

³⁵ Imeum Meunasah, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2016.

³⁶ *Ibid*, hal.98

³⁷ Tuha Peut, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2016.

kecamatan, dan berhujung dengan pengembalian uang tersebut seperti yang diputuskan dalam rapat yang dilaksanakan di kecamatan.³⁸

Menurut Ketua MAA tanah wakaf tidak dapat ditukar apalagi diperjualbelikan, apabila tidak dimungkinkan dapat ditukar tetapi dengan alasan yang jelas dan diketahui oleh masyarakat, karena banyak tanah wakaf di Aceh yang tidak di daftarkan maka hal ini yang terjadi dinamika dalam masyarakat ataupun penggantian secara tidak benar oleh pihak nazhir ataupun di kuasai kembali oleh keturunan atau keluarga pewakif. Undang-Undang Nomor 41 2004 secara keseluruhan belum efektif berlaku dalam pelaksanaan wakaf di Aceh, adapun yang lebih efektif dalam masyarakat Aceh terhadap pelaksanaan perwakafan hanya berdasarkan kebiasaan yang ada.³⁹

Pada dasarnya menurut hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lainnya, kecuali.

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang di ikrarkan.
- b. Karena kepentingan umum.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Aceh besar tanah wakaf yang di wakafkan secara hukum adat Aceh tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti, karena dalam pengantiannya bisa terjadi ketidak sesuaian dengan aturan yang ada. Seperti kasus yang terjadi, seharusnya hasil tanah wakaf yang digantikan yang seharusnya sama dengan tanah yang semula, tetapi akibat tidak pastinya tanah wakaf atau karena tanah tersebut tidak terdaftar, banyak terjadi penyalahgunaan terhadap tanah wakaf tersebut.⁴⁰

Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Besar akibat dari pada pelaksanaan pengantian tanah wakaf yang tidak didaftarkan dapat terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang berkepentingan dan tidak jelasnya tanah yang seharusnya dimiliki untuk kepentingan umat tersebut. Ditinjau dari aspek ibadah wakaf merupakan bukti kepatuhan seseorang manusia kepada suruhan Allah untuk melakukan kebijakan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, yang lazim disebut *Hablum min Allah*, memelihara hubungan manusia dengan Allah SWT.

³⁸ Teuku Marwan, Keuchik Gampong Tanjung, wawancara tanggal 14 Maret 20016

³⁹ Badruzzaman Ismail, ketua MAA Provinsi Aceh. Wawancara tanggal 10 Maret 2016

⁴⁰ *Ibid*, Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Aceh Bessar.

Dalam kenyataannya tanah wakaf yang dialihkan secara hukum adat Aceh tidak diikrarkan dan tidak ada pembuatan akta ikrar wakaf di KUA kecamatan Aceh Besar, maka akibat hukum yang terjadi terhadap tanah wakaf tersebut tidak adanya kepastian hukum, yang menyebabkan terjadinya peralihan tidak sesuai Undang-undang dan mengakibatkan tidak ada transparansi terhadap tanah yang dialihkan seperti terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud diatas diselesaikan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain. Penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian adat di Gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas :

- a. Keuchik atau nama lain
- b. Imeum meunasah atau nama lain
- c. Tuha peut atau nama lain
- d. Sekretaris gampong atau nama lain
- e. Ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.⁴¹

Menurut keuchik gampong tanjong permasalahan pengalihan tanah wakaf tersebut sudah sampai penyelesaiannya tingkat kecamatan tetapi menurut Camat Lhoknga kasus tersebut bisa di musyawarahkan tingkat Gampong, maka Keuchik dan prangkat Gampong telah menyelesaikan kasus pengalihan tanah wakaf tersebut dengan ganti rugi terhadap tanah yang dialihkan tersebut dengan mengembalikan uang tersebut untuk kepentingan Meunasah (mushala) Gampong. Sehingga tanah tersebut tetap diperuntukan untuk Meunasah Gampong Tanjung.⁴²

Kasus pelaksanaan penggantian tanah wakaf yang terjadi di Gampong Tanjung Kecamatan Lhoknga, pihak Gampong mengambil jalur penyelesaian secara Musyawarah dengan perangkat Gampong yang mana dalam musyawarah

⁴¹Taqwadin Husin, *Kapita Selektta Hukum Adat Aceh Dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh, Bandar Publishing, 2013, hal. 8.

⁴² Hasil wawancara dengan T. Marwan, Keuchik Desa Tanjung, tanggal 14 Maret 2015

tersebut terdapat kesepakatan mengembalikan Jumlah uang yang lebih terhadap pembelian tanah wakaf yang digantikan.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. kedudukan penggantian tanah wakaf yang dilaksanakan secara hukum adat Aceh dipandang dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan hukum Islam adalah pelaksanaan penggantian tanah wakaf yang terjadi secara hukum adat Aceh tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karena yang dibenarkan menurut Undang-Undang pelaksanaan penggantian tersebut harus atas izin dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dan adanya Akta Ikrar Penggantian Wakaf untuk menjaga kepastian hukum terhadap tanah yang digantikan. Secara hukum Islam penggantian tanah wakaf yang digantikan tersebut ukuran dan harganya tidak harus sesuai dengan tanah wakaf pada mulanya.
2. Pelaksanaan penggantian tanah wakaf berdasarkan hukum adat Aceh yang terjadi di Gampong Tanjung, Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar di pandang menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah tidak dapat di benarkan, karena dalam kebiasaanya penggantian tanah wakaf di Aceh dilaksanakan dengan cara lisan dan ikrarkan kepada perorangan yaitu imam Meunasah (Mushala) dan terhadap pelaksanaaan yang tidak sesuai aturan dan tidak adanya pendaftaran terhadap tanah wakaf tersebut, maka yang terjadi tidak adanya transparansi terhadap penggantian tanah wakaf sesuai dengan Undang-undang dan secara hukum Islam juga tidak dibenarkan, karena pihak yang melakukan penggantian bertujuan untuk menguntungkan pihak atau kelompoknya sendiri.
3. Akibat hukum penggantian tanah wakaf dipandang dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan hukum Islam adalah tanah wakaf tersebut harus di daftarkan dengan adanya Pembuatan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Penggantian Akta Ikrar Wakaf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pendaftaran pada badan Pertanahan Nasional, untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut, seperti yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka terhadap tanah yang dilaksanakan penggantian secara adat Aceh tidak adanya kepastian hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada Kementrian Agama, dan khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan, Nazhir, Lembaga adat atau lembaga lainnya, hendaknya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penggantian tanah wakaf , pihak pemerintah yang terkait, harus lebih sering terjun kelapangan untuk melihat tatacara penggantian atau problematika yang terjadi dalam masyarakat dan mensosialisasikan pentingnya pendaftaran tanah wakaf khususnya bagi masyarakat yang masih melakukan perwakafan atau penggantian secara adat yang berada di Provinsi Aceh kabupaten Aceh Besar.
2. Benda wakaf yang merupakan amanah yang diikrarkan oleh seorang wakif yang memiliki tujuan untuk masyarakat banyak atau untuk kepentingan Rumah Ibadah yaitu salah satunya Meunasah (Mushala), untuk memperoleh ridha dari Allah SWT, maka hendaknya masyarakat adat lebih ketat mengawasi tanah wakaf tersebut dan bagi lembaga wakaf yang mengatur mengenai wakaf diharapkan mendaftarkan harta wakaf agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Dan bagi lembaga adat Majelis Adat Aceh (MAA) harus lebih fokus terhadap permasalahan wakaf yang ada di Aceh dan mengawasi pelaksanaan adat menyangkut dengan perwakafan tanah, karena banyak tanah wakaf di Aceh yang belum diikrarkan secara Undang-undang yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum terhadap tanah tersebut.
3. Agar pelaksanaan wakaf sesuai dengan aturan yang berlaku sangat diharapkan peran pemerintah dan peran MAA sebagai lembaga adat yang diakui oleh pemerintah untuk sama-sama mengawasi dan selain daripada itu di harapkan sosialisasi pada masyarakat terutama pada masyarakat yang masih kental terhadap kebiasaan maupun adat dalam mewakafkan tanah mengenai peraturan perundang-undangan maupun hukum mengenai wakaf untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengalihan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan menguntungkan satu kelompok tertentu.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2009
- Al-alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta Rajawali , 1989.
- Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung, Alumni, 1994.
- Husin, Taqwaddin, *Kapita Slekta Hukum Adat Aceh Dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh, Bandar Publising, 2013.
- Ismail Badruzaman dan Sanusi M. Syarif, *Sejarah Majelis Adat Aceh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, 2013
- Ismail, Badruzzaman, *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Ada*, Banda Aceh, Cv.Bobon Jaya, 2013
- Manan Abdul , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Preneda Media Group, 2006,
- Mudzakir AS, *Fikih Sunnah/As –Sayyid Saabiq, Jilid 14*, Alma'arif, Bandung, Cet 4 1994,
- Mas'adi, A. Ghufon, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soemitro Hanitijo Ronny, *Metedologi Penemuan Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Thaib, M. Hasballah, *Fiqih Wakaf, Konsentrasi Hukum Islam program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2003,
- Thaib, M Hasballah, *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqih Islam*, Medan, Fakultas Tarbiyah Universitas Dharmawangsa, 1995.